

RINGKASAN

Indonesia telah menentukan 12 Provinsi Prioritas yang mempunyai presentase prevalensi *Stunting* tinggi. *Stunting* adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang waktu yang cukup lama, umumnya hal ini karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi (Kemenkes RI, 2018). Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu instrumen Transfer Ke Daerah (TKD) dalam upaya penanggulangan *Stunting* di Indonesia. Pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan DAK untuk mengatasi *Stunting*, yaitu sebesar Rp62,6 triliun. Namun, laporan *The World Bank* (2016) menyampaikan bahwa realisasi anggaran untuk intervensi *Stunting* di Indonesia secara konsisten menunjukkan hasil yang buruk dari tahun ke tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari DAK Fisik Kesehatan, DAK Fisik Non Kesehatan, dan DAK Nonfisik Non Kesehatan terhadap Angka Prevalensi *Stunting* di 12 Provinsi Prioritas dan menghitung rasio efektivitas anggaran DAK *Stunting*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah *Random Effect Model (REM)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK Fisik Kesehatan, DAK Fisik Non Kesehatan, dan DAK Nonfisik Non Kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Angka Prevalensi *Stunting* di 12 Provinsi Prioritas. Sedangkan, DAK Nonfisik Kesehatan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Angka Prevalensi *Stunting* di 12 Provinsi Prioritas. Selain itu, DAK Fisik Kesehatan dan DAK Fisik Non Kesehatan mempunyai kriteria efektivitas anggaran tidak efektif, DAK Nonfisik Kesehatan kurang efektif, dan DAK Nonfisik Non Kesehatan efektif. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah harus menyesuaikan kembali pengalokasian dana dengan sumber daya, budaya, lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi setiap daerah agar dapat mengidentifikasi intervensi dan program yang tepat sasaran dalam penanganan *Stunting* di 12 Provinsi Prioritas. Selanjutnya, SDM yang berkualitas penting dalam proses pengelolaan dana publik dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang masalah *Stunting*, strategi intervensi yang efektif, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran.

Kata Kunci: Dana Alokasi Khusus *Stunting*, Angka Prevalensi *Stunting*, Transfer ke Daerah, Rasio Efektivitas Anggaran.

SUMMARY

Indonesia has determined 12 Priority Provinces that have a high percentage of stunting prevalence. Stunting is a chronic nutritional problem caused by a lack of nutritional intake over a long period of time, generally due to food intake that is not in accordance with nutritional needs (Kemenkes RI, 2018). The Special Allocation Fund (DAK) is one of the instruments of Transfer to Regions (TKD) in efforts to tackle stunting in Indonesia. In 2022, the government has allocated DAK to address stunting, amounting to IDR 62.6 trillion. However, a report by The World Bank (2016) states that the budget realization for stunting intervention in Indonesia consistently shows poor results from year to year.

This study aims to analyze the effect of DAK Physical Health, DAK Physical Non-Health, and DAK Nonphysical Non-Health on the Stunting Prevalence Rate in 12 Priority Provinces and calculate the DAK Stunting budget effectiveness ratio. This research is a quantitative study using secondary data. The research method used is the Random Effect Model (REM).

The results showed that the Health Physical DAK, Non-Health Physical DAK, and Non-Health Nonphysical DAK had no significant effect on the Stunting Prevalence Rate in 12 Priority Provinces. Meanwhile, the non-physical health DAK has a negative and significant effect on the stunting prevalence rate in 12 priority provinces. In addition, DAK Physical Health and DAK Physical Non-Health have ineffective budget effectiveness criteria, DAK Nonphysical Health is less effective, and DAK Nonphysical Non-Health is effective. The implication of this research is that the government must readjust the allocation of funds to the resources, culture, environment, and socio-economic conditions of each region in order to identify targeted interventions and programs in handling stunting in the 12 Priority Provinces. Furthermore, qualified human resources are important in the process of managing public funds and have extensive knowledge about the problem of stunting, effective intervention strategies, and targeted program implementation.

Keywords: *Stunting Special Allocation Fund, Stunting Prevalence Rate, Transfer to Regions, Budget Effectiveness Ratio.*